
**MELAWAN DENGAN UANG : EKSISTENSI UANG REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA (URIPS) TERHADAP
PEREDARAN UANG NICA DAN JEPANG
DI SUMATERA 1947-1949**

Abdullah, Teuku Junaidi, Hanif Harahap

Abdullahcibro585@gmail.com, teukujunaidi@unsam.ac.id, suratterdahulu@gmail.com

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Samudra

ABSTRACT

Money plays a role in maintaining the independence of the Republic of Indonesia. At the beginning of Indonesia's independence, NICA, which wanted to regain control of Indonesia, carried out various strategies, including by disrupting the monetary economy of Indonesia. By circulating the NICA currency and the Japanese currency indefinitely. Therefore, Indonesia created Oeang Republik Indonesia (ORI). However, it was unable to distribute to various regions. This was due to the blockade of the NICA army and at the same time wanting to destroy the printing of ORI money. At that time, the Government made a mandate to print URIDA money in every region. Sumatra, which at that time printed the Money of the Republic of Indonesia in the Province of Sumatra (URIPS), used as a legal medium of exchange for the people of Sumatra. And at the same time being a means of resistance to the circulation of NICA money and Japanese money in Sumatra. In the declaration it was stipulated that the URIPS was valid in all parts of the island of Sumatra as a legal means of payment. So that URIPS continued to exist among the Sumatran community in 1947-1949.

Keywords: *Money, NICA and Japanese money, the existence of URIPS*

ABSTRAK

Uang berperan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, NICA yang ingin kembali menguasai Indonesia melakukan berbagai strategi diantaranya dengan mengacaukan moneter ekonomi Indonesia. Dengan mengedarkan mata uang NICA dan mata uang Jepang secara tak terbatas. Oleh karena itu, Indonesia mencetak Oeang Republik Indonesia (ORI). Namun tidak mampu mendistribusikan keberbagai daerah. Hal ini dikarenakan adanya pemblokadean dari tentara NICA, sekaligus ingin menghancurkan percetakan uang ORI pada saat itu menjadikan Pemerintah membuat mandat untuk mencetak uang URIDA di setiap daerah. Sumatera yang dikala itu mencetak Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (URIPS), digunakan sebagai alat tukar yang sah bagi masyarakat Sumatera. Dan selakigus menjadi alat perlawanan terhadap peredaran uang NICA dan uang Jepang di Sumatera. Dalam maklumat di tetapkan bahwa URIPS berlaku di seluruh bagian wilayah pulau Sumatera sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga URIPS tetap eksis dikalangan masyarakat sumatera pada tahun 1947-1949.

Kata Kunci: *Uang, Uang NICA dan Jepang, Eksistensi URIPS*

Author correspondence

Email: Abdullahcibro585@gmail.com

Available online at <http://ejournalunsam.id/index.php/jsnbl/index>

I. Pendahuluan

Menurut Baskoro (2017:108) bahwa sejarah perjuangan merebut dan mengisi kemerdekaan terkait erat dengan sejarah uang republik Indonesia. Jika Indonesia mempunyai uang sendiri maka Indonesia merdeka dan berdaulat. Pada masa awal kemerdekaan terjadi perang ekonomi, antara Republik dengan NICA yang sama-sama mengedarkan mata uang untuk merebut simpati rakyat. Atas keputusan politik pemerintah Republik Indonesia yang baru merdeka, negara berinisiatif mencetak dan memberlakukan mata uang sendiri sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia, sekaligus menjadi simbol perjuangan dan legitimasi negara berdaulat dimata Internasional yaitu yang kita kenal dengan sebutan Oeang Republik Indeonesia (ORI).

Oeang Republik Indeonesia (ORI) adalah uang pertama yang dicetak dan diterbitkan oleh pemerintah Republik Indoneisia. Ditetapkan 30 Oktober 1946, mulai pukul 00:00 dan berlaku diseluruh wilayah bekas jajahan Belanda atau Netherland Indie.(Baroroh, 2012 : 6). Namun peredaran ORI dibatasi oleh NICA dengan melakukan blokade ekonomi sehingga peredaran ORItidak bisa menyeluruh kesemua wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui maklumat No.19/1947 tertanggal 26 September 1947 setiap daerah boleh mencetak mata uangnya sendiri yaitu disebut Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). Melalui maklumat tersebut Provinsi Sumatera juga mencetak mata uang sendiri pada 8 April 1947 yang disebut dengan Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (URIPS).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis. Sebagaimana di defenisikan oleh Sjamsuddin (1996 : 67-187) metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau, termasuk didalamnya metode dalam menggali, memberi penilaian, mengartikan serta menafsirkan fakta-fakta masa lampau untuk kemudian dianalisis dan ditariksebuah kesimpulan dari peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode historis.

III. Pembahasan

4.1 Proses Peredaran Uang NICA dan Jepang di Sumatera tahun 1947-1949

4.1.1 Proses Peredaran Uang NICA di Sumatera tahun 1947-1949

Uang NICA yang beredar di Indonesia pada masa revolusi ini terdiri dari pecahan 5 roepiah ¹³/gulden, 2^{1/2} roepiah/gulden, 1 roepiah/gulden, dan pecahan terkecil sebesar 50 sen. Uang 50 sen NICA adalah uang yang paling banyak didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk menggantikan mata uang pendudukan Jepang. Pemerintah NICA menetapkan untuk daerah-daerah luar Pulau Jawa, 3 sen uang NICA sama nilai tukarnya dengan 1 rupiah Jepang. (Bank Indonesia, 2016: 214) Bagian depan dan belakang sisi uang ditulis menggunakan aksara latin dalam bahasa Belanda dan Indonesia agar dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia dan juga orang-orang

Belanda. Keempat emisi uang ini ditandatangani oleh Dr. H.J. v. Mook yang ditunjuk secara *de facto* sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Presiden De Javasche Bank, Dr. R.E Smits. Pada sisi muka uang dicantumkan lambang Kerajaan Belanda, foto Ratu Wilhelmina dan nilai uang, sementara sisi belakang tertulis teks undang-undang Kerajaan Belanda dalam dua bahasa dan juga nilai uang.

4.1.1.1 Munculnya Institusi De Javasche Bank

Di bawah pengawasan pemerintah NICA, De Javasche Bank kembali menjalankan fungsinya sebagai bank sirkulasi untuk daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh tentara NICA. Tindakan pertama yang dilakukan oleh De Javasche Bank adalah dengan melikuidasi dan menyita semua aset milik bank-bank Jepang pada 15 Januari 1946. Jenis mata uang yang dikeluarkan oleh NICA dan didistribusikan melalui De Javasche Bank pada masa itu, yaitu 50 sen (warna merah, dibaliknya warna hijau), 1 gulden (hitam, dibaliknya warna abu), 2^{1/2} gulden (ungu, dibaliknya warna hijau), 5 gulden biru tua (dibaliknya warna hijau), 10 gulden berwarna merah (depan) dan hijau (dibelakang) 25 gulden berwarna coklat (muka) dan hijau (belakang), 50 gulden hijau, 100 gulden coklat tua (depan) dan hijau (belakang), serta 500 gulden biru-abu (depan) hijau (belakang) (Bank Indonesia, 2016: 218).

4.1.1.2 Sistem dan Peredaran Uang NICA di Sumatera

Taktik NICA untuk mengacaukan sistem moneter Indonesia tidak hanya dengan mengambur-hamburkan uang rupiah Jepang secara tidak terbatas, tetapi juga mengedarkan mata uang baru yang disebut juga dengan mata uang NICA (uang merah) dalam jumlah yang sangat besar. Mata uang NICA ini dicetak di Amerika Serikat oleh percetakan *America Banknote Company* atas pesanan dari Kerajaan Belanda. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang *De Javasche Bank Wet* 1922 yang memberikan hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang di Hindia-Belanda, keberadaan uang-uang NICA ini merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap kedudukan *De Javasche Bank* sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mencetak dan mengedarkan uang di Hindia-Belanda (Indonesia).

4.1.1.3 Pembentukan Infrastruktur De Javasche Bank sebagai Pendukung Politik NICA

Aksi NICA yang difungsikan untuk mengedarkan uang Jepang dan uang NICA tersebut memperburuk ekonomi Indonesia yang ditandai dengan semakin tingginya angka inflasi. Warisan inflasi dari masa pendudukan Jepang yang sangat tinggi memberi peluang kepada pemerintah NICA untuk semakin menghancurkan ekonomi Indonesia dengan terus menambah jumlah uang yang beredar. Dalam catatan *De Javasche Bank*, hingga tahun 1947 diperkirakan jumlah uang Jepang yang beredar di Sumatera mencapai 1.6 milyar, sementara itu di Pulau Jawa sebesar 2.4 milyar rupiah Jepang.

4.1.2 Proses Peredaran Uang Jepang di Sumatera tahun 1947-1949

4.1.2.1 Motif Ekonomi dibalik Invasi Militer Jepang

Sebagai langkah untuk mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Indonesia melakukan berbagai strategi. Strategi-strategi yang ditempuh antara lain adalah program pinjaman nasional, mendirikan bank sentral, penataan mata uang yang beredar, serta mencetak ORI. Strategi-strategi yang ditempuh oleh Pemerintah RI selain untuk menata fondasi ekonomi Indonesia pasca perang, juga dilakukan untuk menembus blokade ekonomi Belanda bersama para pengusaha dan masyarakat.

4.1.2.2 Proses Perubahan Sistem Ekonomi Akibat Perang

Untuk menggantikan uang-uang gulden Belanda yang beredar Pemerintah Militer Jepang menerbitkan mata uang Jepang yang disebut sebagai mata uang pendudukan (*invasion money*). Ciri dari mata uang ini berupa tanda De Javanche Regeering Betaalt aan toonder (Pemerintah Jepang membayar kepada sang pembawa) yang diatas uang tersebut. Uang pendudukan ini telah dipersiapkan oleh pemerintah militer Jepang jauh sebelum diberlakukannya operasi pendudukan. Uang ini ditujukan untuk mengacaukan mata uang gulden milik Belanda dan menggantikannya dengan uang-uang Jepang.

4.1.2.3 Pendirian Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG)

Dalam bidang ekonomi, pemerintah Militer Jepang dengan cepat mengubah struktur birokrasi dan ekonomi di Indonesia. Segala model rancangan Jepang yang dianggap lebih memperlihatkan jati diri Asia dan disesuaikan dengan kepentingan perang Jepang. Setelah operasi Militer untuk menduduki wilayah Hindia Belanda terlaksana, berbagai langkah dilakukan oleh Jepang di bidang moneter dan perbankan untuk menggantikan sistem keuangan Belanda. Kebijakan tersebut salah satunya adalah dengan melikuidasi beberapa bank milik Belanda dan Inggris dan menggantinya dengan bank-bank Jepang.

4.1.2.4 Peran dan Proses Peredaran Uang Jepang

Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG) mengeluarkan uang yang dikenal dengan uang Nanpatsu yang memiliki tanda Dai Nippon Teikoku Seifu (Administrasi Tentara Jepang) dengan nilai satuan rupiah yang terdiri dari pecayahan ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah dan 10 rupiah yang diedarkan keseluruh Indonesia. Khusus untuk daerah Sumatera Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG) mengeluarkan pecahan 100 dan 1000 rupiah dengan tujuan untuk menaikkan daya beli masyarakat yang menurun akibat perang. Pemerintah Jepang juga mengedarkan uang logam pecahan 1 sen, 5 sen dan 10 sen dalam jumlah terbatas.

4.2 Eksistensi URIPS Terhadap Peredaran Uang NICA dan Jepang di Sumatera tahun 1947-1949

4.2.1 Eksistensi URIPS Terhadap Peredaran Uang NICA di Sumatera tahun 1947-1949

Upaya pemerintah dengan cara memperbaiki kondisi ekonomi nasional, mencetak dan mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) yang berlaku secara resmi

pada 30 Oktober 1946. ORI yang merupakan mata uang Republik Indonesia selain digunakan sebagai alat pembayaran, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kedaulatan Indonesia kepada dunia. ORI pertama baru bisa diresmikan peredarannya di wilayah RI pada masa Menteri Keuangan Mr. Syafruddin Prawiranegara. (Husen Muhammad, 1993: 7).

4.2.1.1 Kondisi Ekonomi Sumatera dan Blokade Ekonomi Belanda

Sebagai langkah untuk mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Indonesia melakukan berbagai strategi. Strategi-strategi yang ditempuh antara lain adalah program pinjaman nasional, mendirikan bank sentral, penataan mata uang yang beredar, serta mencetak ORI. Strategi-strategi yang ditempuh oleh Pemerintah RI selain untuk menata fondasi ekonomi Indonesia pasca perang, juga dilakukan untuk menembus blokade ekonomi Belanda bersama para pengusaha dan masyarakat.

4.2.1.2 ORI dan Kendala Distribusi Uang Akibat Perang

ORI merupakan mata uang pertama bagi Republik Indonesia sekaligus menjadi sarana untuk perjuangan. Uang ORI yang ketika Negara Republik Indonesia masih baru lahir dan Bangsa Indonesia yang sedang bersatu padu menyatukan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan dan melawan kembalinya kolonialisme di Indonesia. (Wisnu Baskoro, 2015: 7). Uang yang sebenarnya mempunyai nilai ekonomis yang digunakan sebagai alat tukar, alat penyimpanan nilai, satuan hitung dan ukuran pembayaran yang tertunda pada masa ini mempunyai fungsi yang lain. Pada masa revolusi, uang juga mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu, penggugah rasa nasionalisme serta menunjukkan adanya Indonesia yang berdaulat di mata dunia. Sehingga selain uang mempunyai nilai ekonomis, uang juga berdungsi sebagai saranan politik dan perjuangan di wilayah Indonesia.

4.2.1.3 ORIDA Sebagai Strategi Untuk Memenuhi Kebutuhan Ekonomi

Dalam maklumat di tetapkan bahwa URIPS berlaku di seluruh bagian wilayah pulau Sumatera sebagai alat pembayaran yang sah. URIPS emisi Pematang Siantar ini dijamin oleh pemerintah pusat RI dan dapat di tukar dengan ORI dengan nilai tukar 1:1. URIPS yang di keluarkan di Pematang Siantar tersebut terdiri dari pecahan Rp.1, Rp.5, Rp.10, Rp.10, dan Rp.100. Uang ini di tanda tangani oleh R.A. Herman dan R.M. Amin. Untuk pengamanan dari pemalsuan uang URIPS emisi pematang siantar menggunakan kode kontrol (Bank Indonesia 2016 : 248- 251). Masing-masing nilai uang memiliki warna yang berbeda, ada yang berwarna biru dan hijau. Untuk sisi depan uang terdapat lukisan gambar Soekarno, gunung, aktivitas petani di sawah dan nilai uang. Gambar Soekarno yang dicantumkan pada berbagai emisi ORI dan ORIDA yang pernah diterbitkan pada masa revolusi kemerdekaan merupakan simbol semangat dan persatuan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sementara itu, dibagian belakang adalah gambar ornamen dan nilai.

4.2.2 Eksistensi URIPS Terhadap Peredaran Uang Jepang di Sumatera Tahun 1947-1949

Dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat uang memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat vital. Eksistensi uang tidak hanya sebatas alat pembayaran yang sah di negara tersebut, namun juga merupakan simbol yang melegalkan otoritas negara atas rakyat dan wilayahnya. Kebutuhan mendesak akan kesediaan uang milik Republik mendorong pemerintah Indonesia menerbitkan ORI pada 30 Oktober 1946 sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Kedudukannya sebagai mata uang pertama di Indonesia menggantikan pemakaian mata uang gulden yang dikeluarkan oleh pihak Belanda (Fivea La Vida, 2018: 14). Untuk daerah-daerah diluar pulau Jawa dan Madura pemerintah menerapkan Rp. 1 (satu rupiah) ORI sama dengan Rp. 100 (seratus rupiah) uang Jepang.

4.2.2.1 Kemerdekaan Indonesia dan Dekonstruksi Perekonomian Kolonial Jepang

Jepang menjajah Indonesia setelah mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam perang dunia ke II. Jepang menguasai Indonesia dari tahun 1942 -1945 dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia dan semboyan Asia baru. Tentara Jepang mendarat pertama kali pada 11 Januari 1942 yang diawali dengan menguasai daerah-daerah penghasil minyak, seperti Tarakan, Balikpapan, dan beberapa daerah Kalimantan dan Sumatera.

4.2.2.2 Penutupan De Javasche Bank

Pada 1951, muncul gagasan untuk mengambil alih kepemilikan De Javasche Bank dari Belanda. Melalui proses Indonesianisasi saham-saham De Javasche Bank, pemerintah Indonesia mengubah De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1953, Bank Indonesia ditetapkan menjadi Bank Sentral Republik Indonesia.

IV. Penutup

Latar belakang peredaran uang NICA dan Jepang didasarkan bahwa uang berfungsi sebagai “*an instrument of revolution*”. Peredaran uang NICA diawali sejak awal kemerdekaan Indonesia dimana pada saat itu seluruh komponen bangsa saling membantu untuk memperbaiki sistem politik, sosial dan ekonomi. Dijadikannya uang oleh NICA sebagai salah satu senjata untuk menghancurkan ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, namun juga sebagai senjata utama dalam aksi penaklukan, penguasaan dan perlawanan di bidang ekonomi. Taktik NICA untuk mengacaukan sistem moneter Indonesia tidak hanya dengan mengambur-hamburkan uang rupiah Jepang secara tidak terbatas, tetapi juga mengedarkan mata uang baru yang disebut juga dengan mata uang NICA (uang merah) dalam jumlah yang sangat besar. Mata uang NICA ini dicetak di Amerika Serikat oleh percetakan *America Banknote Company* atas pesanan dari Kerajaan Belanda.

Dalam proses peredaran Uang NICA dan Jepang, pemerintah NICA mengaktifkan kembali De Javasche Bank sebagai bank sentral Belanda di Indonesia mulai Oktober 1945. Mengawali tahun 1946, kantor cabang De Javasche Bank di

beberapa kota di Indonesia mulai beroperasi kembali, termasuk De Javasche Bank Agentchap Medan pada 15 Mei 1946. Selain untuk mengedarkan mata uang NICA, pembukaan kembali De Javasche Bank Acentschap Medan tersebut juga dimaksudkan untuk menyelamatkan aset-aset milik pemerintah Hindia-Belanda dan perusahaan asing yang masih tersisa di Sumatera Timur pasca pendudukan Jepang. Besarnya jumlah aset ekonomi pemerintah Hindia Belanda tersebut merupakan sumber keuangan yang potensial untuk memperbaiki kondisi ekonomi Belanda yang hancur akibat perang. Kekayaan sumber ekonomi inilah yang menjadi tujuan utama Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia. Uang NICA yang beredar di Indonesia pada masa revolusi terdiri dari pecahan 5 roepiah ¹³/gulden, 2^{1/2} roepiah/gulden, 1 roepiah/gulden, dan pecahan terkecil sebesar 50 sen. Uang 50 sen NICA adalah uang yang paling banyak didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk menggantikan mata uang pendudukan Jepang. Pemerintah NICA menetapkan untuk daerah-daerah luar Pulau Jawa, 3 sen uang NICA sama nilai tukarnya dengan 1 rupiah Jepang.

Para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia berusaha keluar dari monopoli alat tukar NICA, dengan salah satunya menerbitkan uang URIPS. Dalam maklumat di tetapkan bahwa URIPS berlaku di seluruh bagian wilayah pulau Sumatera sebagai alat pembayaran yang sah. URIPS emisi Pematang Siantar ini dijamin oleh pemerintah pusat RI dan dapat di tukar dengan ORI dengan nilai tukar 1:1. URIPS yang di keluarkan di Pematang Siantar tersebut terdiri dari pecahan Rp.1, Rp.5, Rp.10, Rp.10, dan Rp.100. Uang ini di tanda tangani oleh R.A. Herman dan R.M. Amin. Untuk pengamanan dari pemalsuan uang URIPS emisi pematang siantar menggunakan kode kontrol.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bank Indonesia. 2016. *“Berjuang Dengan Uang “Mempertahankan Dan Memajukan Republik Indonesia Semangat Juang Otorita Dan Masyarakat Sumatera Utara”*. Bank Indonesia.
- Harsono Suwito. 2020. *ORIDA: Oeang Republik Indonesia Daerah 1947-1949*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardi Etni. 2001. *Peranan Kurir, Mata-Mata, dan Tentara Semut dalam Revolusi di Sumatera Barat 1945-1949*.
- Helius Sjamsuddin. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Ombak
- Muhammad Husen, *Pameran Mata Uang ORI: Museum Joang '45*. Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah.
- Murray N. Rothbard. 2007. *“Apa Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?”* Jakarta : Granit.
- Tim Penyusun. 1996. *50 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Citra Media Persada.

SEUNEUBOK LADA

Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan, 8 (2), 2021: 232-239

ISSN : 2356-0770

e-ISSN : 2685-2705

Vida La Fivewa. 2018. *Mutu Menikam*. Yogyakarta: Garudhawaca.

Majalah

Wisnu Baskoro. 2015. Club Oeang Revolusi. Buletin Core No. 1/X.
Numismatika, 2005. Majalah Numismatika. Bandung: Ani Jabar.

Jurnal

Afrizal. 2014. "Kajian Estetik Desain Mata Uang Rupiah Pada Masa Pemerintahan Soekarno Periode 1945-1949". *Jurnal Seni Kriya*. 2 (2).

Amelia, Zaza Yulianti. 2019. "Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Kolonial Jepang Di Sumatera Selatan." Skripsi Jurusan Sejarah : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya.

Banindro Suryo Baskoro. "*Nasionalisme Dalam Bahasa Rupa Uang Kertas Indonesia Masa Revolusi*" fakultas seni rupa dan desain institut seni indonesia denpasar (2017).

Baroroh, Siti Nur Hadisah. "*Pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia dan Pengaruhnya Dalam Bidang Politik dan Ekonomi (1945-1950)*." Skripsi S1 (2012).

Erasiah. 2019. Studi Pemikiran Mestika Zed Tentang Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. *Jurnal Al-Turas*. 25 (1).

Hardiyanto, Arif, and Murni Daulay. 2013. "Analisis persepsi pelaku usaha di kota medan terhadap rencana redenominasi." *Ekonomi dan Keuangan* 1.(4): 38-48.

Limah Hutri. 2018. "Poster Dan Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Di Yogyakarta Tahun 1945-1949". *Journal of Indonesian History*. 7 (1).

Maesaroh, Nani. "Peranan Oeang Republik Indonesia (ORI) Dalam Periode Revolusi Kemerdekaan 1946-1950." Skripsi Jurusan Sejarah: Fakultas Ilmu Sosial UM (2013).

Margianti, Sekar. 2019. *Dinamika De Javasche Bank Agentschap Soerakarta 1950-1968*. *Jurnal Ilmu Sejarah*. 2 (1).

Rinardi, Haryono. 2017. Proklamasi 17 Agustus 1945: Revoluasi Politik Bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. 2. (1).

Sari Dwi Ika, Tinjauan Historis Implementasi Isi Perjanjian Linggarjati Indonesia Dan Belanda Tahun 1946-1947. 3.

Susanti, Ressi. (2018). Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1).

Undri. 2015. "Sejarah Komandemen Sumatera Di Provinsi Sumatera Barat (1945-1949)". *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Budaya*. 1 (2).

Wulan, Sari Septi. (2016). Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa. *Jurnal An-Nisbah*. 3 (1).

Arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia, 2012. *Citra Kota Medan Dalam Arsip*. (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber).